

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Ridwan Halim. 1985. *Pengantar Ilmu hukum Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Achmad Ali. 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.

Aminuddin Ilmar. 2016. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Bagir Manan. 1995. *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan*. Jakarta.

Dyah Ochtorina Susanti. A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

E. Utrecht. 1957. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.

Fajar Laksono Suroso. 2018. *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator: Konfrontatif atau Kooperatif?*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Fajlurrahman Jurdi. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Fatimah dan Syafruddin Syam. 2014. *ilmu Perundang-Undangan*. Medan: CV. Manhaji dan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara.

Gazali. 2022. *Pengantar Ilmu Perundang-Undnagan*. Mataram: Sanabil.

Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktikal Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Isharyanto. 2016. *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: Penerbit WR.

J.H.A Logeman. 1948. *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*. (terjemahan Makkatutu dan J.C. Pangkerego) Universitas Pers Leiden.

Jazim Hamidi. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media.

Jimly Asshiddiqie. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.

Jimly Assidique. 2008. *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Buana Indah Populer.

Jonaedi Efendi. Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.

Jum Anggriani. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jumadi. 2017. *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Maria Farida indriati S. 2007. *ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.

Marwan Mas. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Moh. Mahfud MD. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.

- Mohammad Mahrus Ali. Meyrida Rahmawaty Hilipito dan Syukri Asy'ari. 2015. *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat dan Memuat Norma Baru*". Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. 2020. *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirdjosowowo. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi.

JURNAL

- Abdul Gani. et al. *Penerapan Hak Prerogatif Presiden Dalam Konteks ketatanegaraan Di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*.
- Ade Onny Siagian dan Andrew Shandy Utama. 2021. *Penerapan Asas Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkeadilan dan Partisipatif*. TIN: Terapan Informatika Nusantara. Vol. 2. No. 2.
- Amin Rahmad Panjaitan dan Irwansyah. 2023. *Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah*. UNES LAW REVIEW. Vol. 6. No. 2.

Andi Bau Inggit AR. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah*. Jurnal Restorative Justice. Vol. 3. No. 1. Mei 2019.

Angga Prastyo. Samsul Wahidin dan Supriyadi. 2020. *Pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 11. No. 2.

Arfiani. dkk.. 2023. *Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. PAGARUYUANG Law Journal. Vol. 6. No. 2..

Awik Utari Putri. 2020. *Aspek Hukum Rangkap Jabatan Anggota DPR Sebagai Komisaris Persekutuan Komanditer*. Jurnal Kertha Negara. Volume 8 Nomor 5.

Depri Liber Sonata. 2014. *Metode Penelitian hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justisia Jurnal Hukum. Volume 8 Nomor 1.

Deddik Harianto dan Vieta Imelda Cornelis. 2022. *Tinjauan Rangkap Jabatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam*. Jurnal APHTN-HAN. Vol. 1. No. 1.

Dita Rosalia Arini. 2022. *Pengaturan terhadap Rangkap Jabatan sebagai Menteri sekaligus Pemimpin Daerah dalam Pandangan Politik Hukum Indonesi*. JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Volume 3 Nomor 2.

Jacoba F X Kelbulan. Saartje Sarah alfons dan Hendry John Piris. 2022.
Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri. TATOHI
Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2 Nomor 7.

Johansyah. 2018. *Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945*. Volume 16
Nomor 2.

Kristianto Purwoko. et al., 2022. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern*. Jurnal Riset Akuntansi
dan Auditing, Volume 9 edisi 3.

Lamsumihar Andjelina Panggabean, Budiman Ginting dan Detania Sukarja.
2023. *Aspek Hukum Rangkap Jabatan Direksi Dan Komisaris Pada
Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Prinsip Good Corporate
Governance (GCG)*. RECHT STUDIOSUM LAW REVIEW. Vol. 02.
No. 02.

Reza Kausar dan M. Gaussyah. 2021. *Kedudukan Wakil Menteri Dalam
Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang
Hukum Kenegaraan. Volume 5 Nomor 2.

Riska Arianti. 2019. *Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi
Kementerian Negara*. Hukum dan Keadilan. Volume 6 Nomor 2.

Rokilah dan Sulasno. *Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan*. AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum.
Vol. 5. No. 2. Desember 2021.

Roziqin Roziqin dan Ibnu Sofyhan. 2023. *Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sisten Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal de Jure. Volume 15 Nomor 1.

Sudjana. 2016. *Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. Vol. 25. No. 2.

Supriyadi. 2016. *Community Of Pracitiones: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan*. Lentera Pusaka. Volume 2 Nomor 2.

MAKALAH/LAINNYA

“Anonim”. *“Effendi Gazali: Ketua Dewan BULOG Sudaryono Sukses Serap Aspirasi dan Gabah Petani”*. Website Bulog.co.id. diakses 20 Maret 2025.

“Anonim”. *“Rangkap Jabatan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN: Kegagalan Pemerintah Mengelola Konflik Kepentingan”*. Web Berita Online Indonesia Corruption Watch. Diakses tanggal 14 Mei 2024.

“Anonim”. *“RUPS PLN Tetapkan Empat Komisaris Baru dan Perpanjang Dua Jabatan Direksi”*. Website PLN. Diakses 20 Maret 2025.

Achmad Dwi Afriyadi. *“Dilarang MK Siapa Saja Wamen yang Rangkap Jabatan?”*. Web finance.detik.com. Diakses 28 Agustus 2020.

Agus Sahbani. *"MK Diminta Tegaskan Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri"*. Web Hukum Online. Diakses tanggal 29 Januari 2025.

Ahmad F, *"Profil Chistina Aryani, Komisaris PT Semen Indonesia Dulu Pernah Jadi Wakil Menteri dan Anggota DPR RI"*. Website Arahpena.com. Diakses 7 Juni 2025.

Ana Noviani & Dionisio Damara Tonce. *"Wamen BUMN Dony Oskaria Duduki Kursi Wakil Komisaris Utama Pertamina"*. Website Market.bisnis.com. Diakses 20 Maret 2025.

Anstasya Lavenia Y, *"Wamen Kondigi Angga Raka Prabowoo Diangkat jadi Komisaris Utama PT Telkom"*, Website Tempo.co. Diakses 7 Juni 2025.

Astrid Faidlatul Habibah, *"Karika Wirjoatmodjo ditetapkan jadi Komut BRI"*. Website Antaranews.com. Diakses 20 Maret 2025.

Aswanto. *"Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi"*. Kuliah Umum Hakim Konstitusi Aswanto di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 27 April 2022.

Imam Sukanto. *"Rangkap Jabatan Menteri di Struktural Danantara: Rosan Roeslani, Erick Thohir, Dony Oskaria, hingga Sri Mulyani"*. Web Tempo.co. Diakses 21 Maret 2025.

Irwan Rismawan. *"UU Kementerian Digugat ke MK. Persoalkan 5 Wamen Prabowo Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN"*. Web Tribunnews.com. Diakses 21 Maret 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online dengan kata kunci Akibat, Diakses 1 Agustus 2024.

Lulu Anjarsari, *"Ahli Pemerintah: Pengangkatan Wakil Menteri, Kekuasaan Diskresi Presiden"*. Web Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses tanggal 12 Maret 2025.

Melynda Dwi Puspita, *"Gaji Nezar Patria yang jadi Wamen Komdigi dan komisaris Utama Indosat"*, Website Tempo.co. Diakses 7 Juni 2025.

Mkh, *"Staffsus Mensesneg & Isyana Bgoes Oka Jadi Komisaris Mitratel (MTEL)"*. CNBC Indonesia.com. Diakses 7 Juni 2025.

Rofiq Hidayat. *"Larangan Rangkap Jabatan Aparatur Negara"*. Web Hukum Online. Diakses tanggal 25 Juni 2024.

Romys Binekasri, *"Profil Fahri Hamzah, Politikus Gelora yang Diangkat Jadi Komisaris BTN"*. CNBC Indonesia.com. Diakses 7 Juni 2025.

Utami Argawati. *"Menyoal Kembali Rangkap Jabatan Wakil Menteri"*. Web Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses tanggal 29 Januari 2025.

Website Hukum online news room. Diakses 7 Juni 2025.

Website Brantas-abipraya.co.id. Diakses 7 Juni 2025.

Website Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Website Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Website Telkom Indonesia.co.id. Diakses 7 Juni 2025.

Website Telkomsel.com. Diakses 7 Juni 2025.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-7/MBU/09/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.